

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Abdullah, Faisal, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Abdullah, Rozali, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : Rajawali
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia
- Daud Busroh, Abu, 1989, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Basah Sjahran, 1992, *Menelaah Peradilan liku-liku Rancangan Undang-Undang No.- Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni
- Basah, Sjahran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Hanitjo Soemitro, Ronny, 1989, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo
- Indrati S Maria, Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni
- M. Hadjon, Philipus, 2019, , *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan ketigabelas
- Manan, Bagir, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung : Armico
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud, 2000, *POKOK-POKOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Yogyakarta: Liberty

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY

P. Sibuea, Hotma, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*. Jakarta: Erlangga

Prajudi Atmosudirjo, S, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ragawino, Bewa, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Pustaka Unpad

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta : UII Press

Riawan Tjandra, W, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur : Sinar Grafika

Solly Lubis, M, 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Mandar Maju

Soekanto, Soekarjo, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres

Soemitro, Rachmat, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dalam hukum pajak di Indonesia*, Jakarta: Eresco

Sudrajat, Tedi, 2019, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Supratman, Hayat, Umi Salamah, 2019, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung : PT Refika Aditama

Widjaja, A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : Raja Grafindo

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5494. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5079. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Yang Mengatur Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 169. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Yang Mengatur Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 122. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 6264. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 65. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Pembina Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 864. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 112. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 1260. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan BKN No.1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 1332. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Jurnal Volume

Adrie, 2019, "*PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUMKEPEGAWAIAN*" Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol 13 No.2.

Akili, Rustam, 2012" *Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*", Vol 05, No 01.

Ayu Putri Wulandari, Ida, Ibrahim R, Ketut Suadirta, 2018 "*KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (PPP) KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA*" Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], volume 7 nomor 1.

Bram Mahaputra, Akbar, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2015 "*Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*". Jurnal Kertha Negara, Volume 03, Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Immanuel W Innale, Victor, 2013 "*KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009*" Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika.

Kurniawan, Rudi, Muhammad Rasyidin, Fidhia Aruni, 2020, "*Upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Aceh Utara*", Jurnal Public Policy, Vol. 6 No.1.

Sulistyo Tri Putranto, Agustinus, Ichwan Santosa, 2015, "*Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Pengertian dan Urgensinya*," Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara.

Rudi Kurniawan, Rasyid, Muhammad, Fidhia Aruni, 2020 "*Upaya Pemerintah dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Aceh Utara*". Jurnal Public Policy. Vol 6 No. 1.

D. Internet

Anisyah Al Faqir, “Pemerintah Catat Saat ini Ada 438.590 Pegawai Honorer, 35 Persennya Guru”, <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-catat-saat-ini-ada-438590-pegawai-honorer-35-persennya-guru.html> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 20.12)

Humas,” *Inilah Hak-Hak dan Kewajiban ASN Yang Direkrut Melalui Jalur PPPK*”, <https://setkab.go.id/inilah-hak-hak-dan-kewajiban-asn-yang-direkrut-melalui-jalur-pppk/> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 21:15)

